



## **KONSEP DAN URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**Nurul Atikah**

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

**Laila Sari**

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

**Tya Aryani**

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

**Sabrina Nurul Aisyah**

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

**Bambang Trisno**

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi

*Korespondensi penulis:* <sup>1</sup>20nurulatikah22@gmail.com, <sup>2</sup>tyaariani34@gmail.com,

<sup>3</sup>lailasari5042@gmail.com, <sup>4</sup>syabrina@gmail.com , <sup>5</sup>bambangtrisno@uinbukittinggi.ac.id

**Abstract.** *Pancasila and citizenship education have a large role in the context of national and state life in Indonesia and the formation and maintenance of a democratic state. Pancasila education is important to be able to educate about moral values, strengthen national identity, the basis for political maturity, safeguard social stability, maintain the sovereignty and integrity of the state, understand the rights and obligations as citizens, strengthen national identity and a sense of belonging to the state, prepare to actively participate in democratic life, foster democratic attitudes, respect for diversity, and support sustainable social and economic development. Thus, Pancasila and citizenship education is not only important for individual interests, but also for the stability, progress and sustainability of the country in the long term. The research method used in this research is a literature study that uses analysis through various sources such as books, journals, articles and other types of documents that support: Research findings show that Pancasila and Citizenship Education is very important to maintain the existing basic values of Indonesian citizens. Even before Pancasila was born, it was to prevent the erosion of these values which could threaten national resilience and sovereignty by liberal values from foreign countries and cultures. Where Pancasila and Citizenship Education is not just a lesson in the world of education, but is also an effort to shape national character and awareness for each individual in building a better Indonesia, maintaining state stability, progress and long-term sustainability of the country.*

**Keywords:** *Education, Pancasila, Citizenship*

**Abstrak.** Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran yang besar dalam konteks kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia dan pembentukan serta pemeliharaan negara demokratis. Pendidikan Pancasila penting untuk dapat mendidik tentang nilai-nilai moral, menguatkan identitas nasional, dasar bagi kedewasaan

berpolitik, penjaga kestabilan sosial, menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, menguatkan identitas nasional dan rasa memiliki terhadap negara, mempersiapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis, menumbuhkan sikap demokratis, penghargaan terhadap keberagaman, dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bukan hanya penting untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk stabilitas, kemajuan, dan kesinambungan negara dalam jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang menggunakan analisis melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel dan jenis dokumen lainnya yang mendukung: Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting dilakukan untuk menjaga nilai dasar warga negara Indonesia yang sudah ada bahkan sebelum Pancasila itu lahir demi tidak tergerusnya nilai tersebut yang dapat mengancam ketahanan dan kedaulatan nasional oleh nilai liberalisme dari negara dan budaya asing. Dimana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan hanya sekadar pelajaran di dunia pendidikan, tetapi juga merupakan upaya untuk membentuk karakter dan kesadaran berbangsa bagi setiap individu dalam membangun Indonesia yang lebih baik, menjaga stabilitas negara, kemajuan, dan kesinambungan negara dalam jangka panjang.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Pancasila, Kewarganegaraan

## LATAR BELAKANG

Pada aspek ideologi, nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam pada bangsa Indonesia dihadapkan pada semakin massif dan perpasifnya nilai-nilai ideologi-ideologi dunia seperti ideologi kapitalisme/liberalisme, komunisme, sosialisme, dan religionisme menerpa bangsa dan Negara Indonesia. Tentu Pancasila sebagai ideologi terbuka sangat terbuka padaperkembangan-perkembangan dunia dan masyarakatnya, namun demikian masyarakat Indonesia sebagai pemilik nilai-nilai Pancasila, seringkali lupa bahwa dirinya telah memiliki nilai-nilai yang luhur tersebut sebagai nilai yang turun temurun yang tertanam dan dipegang erat oleh nenek moyang bangsa Indonesia sesuai dengan perkembangan sejarah bangsanya.

Kondisi ini telah menyebabkan pada sebagian masyarakat Indonesia lalai terhadap miliknya, secara tidak sadar mengabaikan nilai-nilai luhur tersebut yang merupakan "Philosophische grondslag" atau falsafah bangsanya. Pada sebagian lain dengan sengaja meninggalkan nilai-nilai tersebut dan mengambil nilai-nilai lain dari berbagai ideologi yang bertebaran di dunia. Inilah yang sering penulis sebut sebagai "menyelingkuhi ideologi" karena sering mengatakan "rumput tetangga lebih hijau dari rumput yang dimilikinya", dengan kata lain meninggalkan ideologi Pancasila mengambil ideologi lain. Sementara sebagian lagi masyarakat Indonesia kurang memahami makna nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila, sehingga dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut tidak terintegrasi atau bersifat parsial.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan lemahnya ketahanan ideologi, Pancasila yang telah disepakai bersama sebagai fundamen dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semakin lama terlupakan atau dilupakan oleh masyarakatnya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ujang Suratno, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit K-Medaia, 2020), hlm. 1-2

Selain pendidikan Pancasila pendidikan kewarganegaraan juga dibutuhkan untuk ketahanan nasional. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”. Konfigurasi atau kerangka sistemik PKN dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut. Pertama, PKN secara kurikuler dirancang sebagai subjek

Pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, pendidikan kewarganegaraan secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKN secara pragmatik dirancang sebagai subjek Indonesia yang kemudian di bangun menjadi konsep dasar negara. Identitas itulah yang kemudian dikembangkan, dikelola dan digali oleh para tokoh perumus dasar negara sebagai referensi dalam merumuskan Pancasila sebagai landasan berpijak dan berakhlak bangsa Indonesia. Di antara nilai-nilai yang berkembang dan dipandang sangat mengakar di lingkungan Indonesia nusantara adalah kepercayaan kepada Tuhan, yang dilandasi dengan toleransi antar umat beragama, gotong royong yang dibangun atas dasar kesadaran masyarakat berdasarkan kepentingan bersama, musyawarah yang dianggap sebagai jalan yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan umat masyarakat. Sebab musyawarah salah satu cara jitu bukan hanya dalam menyelesaikan problematika masyarakat, tapi upaya sadar masyarakat bahwa setiap orang berhak mengemukakan pendapat dan kesetiakawanan dalam segala hal yang merupakan kedewasaan berpikir manusia, bahwa dirinya tanpa orang lain tidak bisa apa-apa.

Pendidikan Pancasila merupakan upaya yang disengaja serta terorganisir dalam menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa agar aktif mengembangkan potensi pengetahuan, kepribadian, dan kompetensinya. Dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, mahasiswa mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, negara, dan negara. Artinya mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai calon pemimpin bangsa dengan membentuk sikap profesionalnya dengan disesuaikan program studi yang mereka ambil. Menjadikan Pancasila sebagai penuntun menjadi warga Negara yang baik.

Pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.<sup>2</sup>

## **KAJIAN TEORITIS**

Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan

---

<sup>2</sup> Sunarso, Kus Eddy Sartono, Sigit Dwikusrahmadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: UNY Press: 2016) hlm. 1-2

kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dituangkan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan bangsa and character building.<sup>3</sup>

Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran akan negara, sikap dan perilaku yang mencintai tanah air dan membangun budaya bangsa, wawasan tentang negara kepulauan, dan ketahanan nasional dalam penerus bangsa masa depan yang sedang dan sedang belajar dan akan menguasai pengetahuan ilmiah dan teknologi serta seni. Selain itu pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia yang berbudi luhur, kepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah studi kepustakaan (*library reseach*). Penelitian ini kemudian dikaji menggunakan kajian literatur yang membahas pentingnya topik dan membandingkan hasilnya dengan temuan pada penelitian lain pada topik yang sama dan pada akhirnya menghasilkan sebuah gagasan. Untuk memperoleh data penulis menggunakan sumber yang terdapat di perpustakaan seperti buku, jurnal, dan internet. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah metode analisa isi (*content analysisi*). Melalui metode ini, peneliti dapat menyusun sebuah karya ilmiah yang komprehensif dan terstruktur mengenai “Konsep Dan Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Dan Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Sejak dahulu Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai keberagaman (multikulturalisme), keberagaman itu yang menjadi ciri khas bangsa

Adapun visi misi Pendidikan pancasila sebagai berikut.

1. Visi Pendidikan Pancasila
 

Dalam memaknai visi Pendidikan Pancasila adalah bagaimana terwujudnya akhlak atau kepribadian akademik yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2. Misi Pendidikan Pancasila
  - a. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
  - b. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
  - c. Mengkaji dan mengembangkan Pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (*synthetic discipline*), sebagai misi akademik
  - d. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).

<sup>3</sup> Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal 13

<sup>4</sup> Ismail dan Sri Hartati, *Pendidikan Kewarganegaraan (Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia)*. (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal 1

Pemaknaan Pancasila sebagai Pendidikan Pancasila yang harus dilakukan dalam setidaknya memperhatikan empat pilar Pendidikan yang dikembangkan oleh UNESCO. Empat pilar ini menjadi rujukan dalam pengembangannya yang meliputi “*learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*”

Dari empat pilar Pendidikan tersebut Pendidikan Pancasila lebih dominan pada pilar ke-4 yang dapat mengejawantahkan seseorang belajar secara sadar untuk bangun kehidupannya dari keberagaman yang dapat menghasilkan keuntungan bersama, manakala dapat dibangun dengan baik.<sup>5</sup>

Dalam dekade ini Indonesia tidak sedang baikbaik saja, munculan beberapa masalah yang melanda bangsa Indonesia merupakan salah satu bentuk krisisnya penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat bangsa Indonesia, oleh karena itu perlu diperhatikan dari berbagai aspek yang kemudian hal ini patut dikaji dalam forum akademisi salah satunya melalui perguruan tinggi. Lewat mata kuliah Pendidikan Pancasila mahasiswa atau masyarakat akademik akan semakin peka terhadap permasalahan bangsa yang sebenarnya sudah menjadi masalah kita yang harus diselesaikan. Permasalahan yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat seperti:

1. Masalah korupsi
2. Masalah disintegrasi bangsa .
3. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan
4. Masalah terorisme
5. Masalah kesadaran perpajakan
6. Masalah narkoba
7. Masalah lingkungan
8. Masalah dekadensi moral

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, mata kuliah Pendidikan Pancasila sangat utama dan penting untuk diberikan di setiap jenjang sekolah, dalam tingkat perguruan tinggi. Hal ini bermula dari kebutuhan untuk mencegah siswa tercerabut dari akar budayanya sendiri dan membekali mereka dengan aturan atau prinsip pedoman untuk berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan cita-cita Pancasila. Semangat kebangsaan siswa perlu dikuatkan agar dapat menjadi pendorong utama (*leitmotive*) dan bintang pemandu (*leitstar*) bagi masyarakatnya (Abdul Gani, 1979: 14).<sup>6</sup> Perlunya Pendidikan Pancasila bagi peserta didik yang menjadi calon pemimpin bangsa di berbagai tingkatan dan di berbagai bidang, terutama agar tidak terpengaruh secara negatif oleh faktor asing.

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban seorang warga negara, sehingga segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Karena nilai pentingnya, pendidikan ini telah diterapkan sejak dini di setiap arena pendidikan dari paling awal hingga perguruan tinggi, sehingga para penerus bangsa menjadi kompeten dan siap menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>5</sup> Hendri dan Ichwani Siti Utami, *Pendidikan Pancasila*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2022), hal 1-4

<sup>6</sup> Roeslan *Abdulgani, Pengembangan Pancasila Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), hal

Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran akan negara, sikap dan perilaku yang mencintai tanah air dan membangun budaya bangsa, wawasan tentang negara kepulauan, dan ketahanan nasional dalam penerus bangsa masa depan yang sedang dan sedang belajar dan akan menguasai pengetahuan ilmiah dan teknologi serta seni. Selain itu pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia yang berbudi luhur, kepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.<sup>7</sup>

#### **B. Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan**

Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dituangkan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan bangsa and character building.<sup>8</sup>

Kehadiran pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) pada masa reformasi ini haruslah benar-benar dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu mengantar bangsa Indonesia menciptakan demokrasi, good governance, Negara hukum, dan masyarakat sipil yang relevan dengan tuntutan global. Tentunya ekspektasi ini harus disertai dengan tindakan nyata bangsa Indonesia ini, khususnya kalangan perguruan tinggi untuk mengapresiasi dan mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan dalam dunia pendidikan. Jadi, hasil pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) sangat penting artinya bagi penumbuhan budaya demokrasi di Indonesia.

Materi pendidikan kewarganegaraan yang baik adalah apa yang ada pada kehidupan warga negara itu sendiri. Hal ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan harus dapat menyajikan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan masyarakat, politik dan pemerintahan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka materi pendidikan kewarganegaraan mencakup:

1. Kajian berbagai konsep yang bersifat universal, seperti HAM, demokrasi, *open society*, order politik.
2. Sistem dan sejarah politik Indonesia, seperti Pancasila dan UUD 1945 berikut sejarah dan situasi kelahirannya
3. Bentuk pemerintahan dan sistem politik Indonesia
4. Warga negara sebagai aktor utama dan hak-hak politiknya
5. *Civic education*, politik, pemerintahan, dan demokrasi ditinjau dari perspektif Islam.<sup>9</sup>

Dengan memahami latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, maka diharapkan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan bahwa melalui Pendidikan

<sup>7</sup> Ismail dan Sri Hartati, *Pendidikan Kewarganegaraan (Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia)*. (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal 1

<sup>8</sup> Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal 13

<sup>9</sup> Zamroni, *Pendidikan Dan Demokrasi Dalam Transisi*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), hal 139

Kewarganegaraan, paradigma pendidikan demokrasi secara sistematis dengan perkembangan civic intelligence, civic participation, and civic responsibility dari “*civic education*” merupakan wahana pendidikan demokrasi yang diharapkan dapat menghasilkan manusia berkualitas dengan keahlian profesional serta keberadaban khas.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di mana pun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Kita dapat mencermati Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat mencapai tujuan berikut:

1. Mendidik tentang nilai-nilai moral: Pancasila mengajarkan nilai-nilai moral seperti keadilan, persatuan, kerakyatan, kebersamaan, dan ketuhanan yang maha esa. Ini membentuk dasar moral bagi warga negara Indonesia dalam berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat.
2. Memperkuat identitas nasional: Pancasila merupakan ideologi dan falsafah negara Indonesia yang mempersatukan keragaman budaya, suku, dan agama. Pendidikan Pancasila membantu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ini.
3. Dasar bagi kedewasaan berpolitik: Mengerti Pancasila berarti memahami prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan Pancasila mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial.
4. Menjaga kestabilan sosial: Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil.
5. Menjaga kedaulatan dan keutuhan negara: Pancasila sebagai ideologi negara merupakan landasan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara: Pendidikan kewarganegaraan membantu individu memahami hak-hak mereka sebagai warga negara, seperti hak untuk berpendapat, hak untuk memilih, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah dan lembaga publik. Selain itu, pendidikan ini juga mengajarkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, seperti membayar pajak dan mematuhi hukum.
7. Memperkuat identitas nasional dan rasa memiliki terhadap negara: Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diajarkan tentang sejarah, budaya, nilai-nilai, dan simbol-simbol nasional yang memperkuat rasa cinta dan rasa memiliki terhadap negara. Ini penting untuk membangun kebersamaan dan solidaritas di antara warga negara.
8. Mempersiapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis: Pendidikan kewarganegaraan membekali individu dengan pengetahuan tentang sistem politik, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme

- demokrasi. Ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum, kegiatan politik, dan kegiatan masyarakat lainnya.
9. Menumbuhkan sikap demokratis dan penghargaan terhadap keberagaman: Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, menghormati perbedaan pendapat, dan menghargai keberagaman budaya dan agama. Ini membantu mencegah konflik sosial dan mempromosikan harmoni di antara warga negara yang berasal dari berbagai latar belakang.
  10. Mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan: Warga negara yang terdidik tentang kewarganegaraan cenderung lebih peduli terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mereka lebih mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

### C. Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan

Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Boedi Octomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Boedi Oetomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia.

Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tatanan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai Tanah air dan bangsa Indonesia. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat.

Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah Kewarganegaraan (1957), Civics (1962) dan Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civics (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato- pidato politik kenegaraan

yang terutama diarahkan untuk “*nation and character building*” bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dibutuhkan untuk ketahanan nasional dari nilai-nilai yang dapat menggerus keutuhan bangsa seperti liberalisme dan *westernisasi* yang dapat mengiris cinta tanah air serta budaya lokal. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting dilakukan untuk menjaga nilai dasar warga negara Indonesia yang sudah ada bahkan sebelum Pancasila itu lahir demi tidak tergerusnya nilai tersebut yang dapat mengancam ketahanan dan kedaulatan nasional oleh nilai liberalisme dari negara dan budaya asing. Pendidikan Pancasila memiliki pentingan yang besar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut beberapa alasan mengapa pendidikan Pancasila penting:

1. Mendidik tentang nilai-nilai moral: Pancasila mengajarkan nilai-nilai moral seperti keadilan, persatuan, kerakyatan, kebersamaan, dan ketuhanan yang maha esa. Ini membentuk dasar moral bagi warga negara Indonesia dalam berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat.
2. Memperkuat identitas nasional: Pancasila merupakan ideologi dan falsafah negara Indonesia yang mempersatukan keragaman budaya, suku, dan agama. Pendidikan Pancasila membantu memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ini.
3. Dasar bagi kedewasaan berpolitik: Mengerti Pancasila berarti memahami prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan Pancasila mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial.
4. Menjaga kestabilan sosial: Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil.
5. Menjaga kedaulatan dan keutuhan negara: Pancasila sebagai ideologi negara merupakan landasan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara: Pendidikan kewarganegaraan membantu individu memahami hak-hak mereka sebagai warga negara, seperti hak untuk berpendapat, hak untuk memilih, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah dan lembaga publik. Selain itu, pendidikan ini juga mengajarkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, seperti membayar pajak dan mematuhi hukum.
7. Memperkuat identitas nasional dan rasa memiliki terhadap negara: Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diajarkan tentang sejarah, budaya, nilai-nilai, dan simbol-simbol nasional yang memperkuat rasa cinta dan rasa memiliki terhadap negara. Ini penting untuk membangun kebersamaan dan solidaritas di antara warga negara.
8. Mempersiapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis: Pendidikan kewarganegaraan membekali individu dengan pengetahuan tentang sistem politik, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme demokrasi. Ini memungkinkan

---

<sup>10</sup> Ali Akbar, *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hal 9-14

mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum, kegiatan politik, dan kegiatan masyarakat lainnya.

9. Menumbuhkan sikap demokratis dan penghargaan terhadap keberagaman: Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, menghormati perbedaan pendapat, dan menghargai keberagaman budaya dan agama. Ini membantu mencegah konflik sosial dan mempromosikan harmoni di antara warga negara yang berasal dari berbagai latar belakang.
10. Mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan: Warga negara yang terdidik tentang kewarganegaraan cenderung lebih peduli terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mereka lebih mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan hanya sekadar pelajaran di dunia pendidikan, tetapi juga merupakan upaya untuk membentuk karakter dan kesadaran berbangsa bagi setiap individu dalam membangun Indonesia yang lebih baik, menjaga stabilitas negara, kemajuan, dan kesinambungan negara dalam jangka panjang

## DAFTAR REFERENSI

- Akbar, Ali. 2022. *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Damri Dan Fauzi Eka Putra. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kencana
- Endri Dan Ichwani Siti Utami. 2022. *Pendidikan Pancasila*, (Tangerang Selatan: Unpam Pres
- Ismail Dan Sri Hartati, *Pendidikan Kewarganegaraan (Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia)*. 2020. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media
- Roeslan *Abdulgani, Pengembangan Pancasila Di Indonesia*. 1979. (Jakarta: Yayasan Idayu
- Sunarso, Kus Eddy Sartono, Dan Sigit Dwikusrahmadi. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: UNY Press, 2016)
- Suratno, Ujang. 2020. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit K-Media
- Zamroni, 2007. *Pendidikan Dan Demokrasi Dalam Transisi*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah